

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

15

Radar Lampung

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
			<input checked="" type="checkbox"/>										

Nanang Serahkan Laporan Keuangan ke BPK



Semoga kita bisa kembali mendapatkan WTP untuk kinerja keuangan daerah tahun 2020.

NANANG ERMAHTO - Bupati Lampung Selatan

KALIANDA, TRIBUN - Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto serahkan laporan keuangan tahun 2020 yang belum diaudit (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Penyerahan laporan keuangan dilakukan secara virtual dengan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Andri Yogama, pada Senin (15/3). Penyerahan tersebut dilakukan bersamaan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Nanang berharap, untuk laporan keuangan tahun 2020 nantinya Lampung Selatan kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

"Semoga kita bisa kembali mendapatkan WTP untuk kinerja keuangan daerah tahun 2020," ujarnya.

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Andri Yogama mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan gubernur, bupati/wali kota yang disusun berdasarkan standar

akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan diserahkan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dikatakannya, diterimanya laporan keuangan unaudited tersebut, menunjukkan bahwa kepala daerah telah memiliki komitmen yang kuat. "Ini artinya kepala daerah dapat melaksa-

nakan kewajiban menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak ibu yang telah menyerahkan laporan keuangan hari ini," kata dia.

Andri menambahkan, setelah laporan keuangan diterima, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih rinci selama 30 hari ke seluruh pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan tersebut. "Dimulai besok. Selasa (16/3), tim BPK akan datang ke kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan sekaligus menje- laskan rencana pelaksanaan pemeriksaan selama 30 hari kedepan," pungkasnya. (ded)